

KLASIFIKASI INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

| NO | DASAR PENGKLARIFIKASIAN                                                                                                                                                                                                               | INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA                | INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA                                                                                 | INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (Informasi lewat Media Center dan Situs Website)   | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                     | 4                                                                                                                                 | 5                                                                                            | 6                                                                                      |
| 1. | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.                                                                                                                                                                                   | 1. Data Umum Kepegawaian Dishut Provinsi Kalimantan Tengah.           | 1. Informasi yang bersifat situasional misal berita duka.                                                                         | 1. Informasi tentang Struktur Organisasi dan Nama Pejabat/Peta Jabatan                       | 1. Informasi data pribadi pegawai/HAK                                                  |
| 2. | Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik                                                                                                                                            | 2. Data Pegawai yang naik pangkat regular                             | 2. Informasi Diklat/Kursus Teknis Kehutanan.                                                                                      | 2. Struktur PPID Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah                                  | 2. Informasi jenis kegiatan yang masih dalam tahapan pengumpulan bahan dan keterangan. |
| 3. | Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                       | 3. Data Pegawai yang mendapatkan Gaji Berkala                         | 3. Pelanggaran Disiplin Pegawai                                                                                                   | 3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa                                                  | 3. Disposisi/arahan atasan.                                                            |
| 4. | Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.                                                                                                     | 4. PNS yang memasuki masa pensiun                                     | 4. Regulasi terkait dengan petunjuk pelaksanaan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang ijin pemanfaatan hutan | 4. Data Kawasan Hutan dan Perairan                                                           |                                                                                        |
| 5. | Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 820/13/Dishut tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. | 5. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Eksplorasi dan Eksploitasi)  | 5. Informasi terkait dengan adanya indikasi pelanggaran di bidang pengusahaan hutan.                                              | 5. Data Tata Batas Kawasan Hutan                                                             |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Data Pelepasan Kawasan Hutan                                       | 6. Regulasi dan perubahan regulasi terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan.                                                     | 6. Data Kawasan Hutan yang telah ditetapkan                                                  |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 7. Data Tukar Menukar Kawasan Hutan                                   | 7. Penetapan Petugas Ganis dan wasanis PHPL-PKB                                                                                   | 7. Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan                                                      |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 8. Statistik Kehutanan                                                |                                                                                                                                   | 8. Mekanisme pelepasan kawasan hutan                                                         |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 9. Data Kondisi Penutupan Kawasan Hutan                               |                                                                                                                                   | 9. Mekanisme tukar menukar kawasan hutan                                                     |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Data IPK                                                          |                                                                                                                                   | 10. Mekanisme Perizinan (IPK, IUPHHK - HA/HT/RE)                                             |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 11. Data IUPHHK -HA/HTI                                               |                                                                                                                                   | 11. Data KPH (Perkembangan Kelembagaan)                                                      |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Data IUPHHK Restorasi Ekosistem                                   |                                                                                                                                   | 12. Data PHPL                                                                                |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 13. Data KPH                                                          |                                                                                                                                   | 13. Regulasi teknis yang merupakan konsideran bagi penetapan pelanggaran di bidang kehutanan |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 14. Data Jasa Lingkungan                                              |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 15. Data PHPL                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 17. Data Pemegang Izin di bidang Pengusahaan Hutan di wilayah Kalteng |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Jumlah Polhut dan PPNS se Kalimantan Tengah.                      |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 19. Data Ilegal Logging se Kalteng                                    |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                       | 20. Data Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah                    |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   | 21. Data Hutan Desa di Kalimantan Tengah<br>22. Data Persediaan dan Pendistribusian Bibit Tanaman kepada Masyarakat<br>23. Data Penanaman Satu Milyar Pohon<br>24. Laporan Produksi Kayu Bulat<br>25. Laporan Angkut Kayu<br>26. Laporan Mutasi Kayu<br>27. Laporan Iuran Kehutanan<br>28. Laporan Alat Berat Pengusahaan Hutan<br>29. Laporan Tenaga Teknis Pengusahaan Hutan |   | 14. Informasi tentang penetapan harga patokan PSDH sebagai dasar penentuan besarnya sanksi denda administrative.<br>15. Regulasi dan perubahan regulasi terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan.<br>16. Informasi Flora dan Fauna yang dilindungi.<br>17. Rencana Kerja tahun Berjalan<br>18. LAKIP Tahun sebelumnya<br>19. Data Produksi Hasil Hutan<br>20. Data Iuran Kehutanan<br>21. Data Industri Hasil Hutan<br>22. Pengadaan Barang/jasa yang masih dalam proses<br>23. Informasi jenis kegiatan dalam DPA/DIPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah |   |

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA DINAS,  
  
 AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197708171997031003